

***NETWORKING INSTITUTIONALISM* DALAM OPTIMALISASI
KEBIJAKAN PRO GENDER OLEH KAUKUS PEREMPUAN
PARLEMEN LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

KHAIRUNNISA MAULIDA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

NETWORKING INSTITUTIONALISM DALAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PRO GENDER OLEH KAUKUS PEREMPUAN PARLEMEN LAMPUNG

Oleh :

Khairunnisa Maulida

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memiliki 12 orang anggota perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan dapat memperjuangkan kebijakan pro gender. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *networking institutionalism* dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *networking institutionalism*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kaukus Perempuan Parlemen Lampung, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta pengamat politik Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh anggota perempuan parlemen yang juga merupakan anggota Kaukus Perempuan Parlemen Lampung telah berjejaring dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akademisi, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, DPRD Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Anggaran Kaukus Perempuan Parlemen Lampung melekat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Kaukus Perempuan Parlemen Lampung melaksanakan kegiatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan monitoring melalui Laporan PertanggungJawaban kegiatan yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Kaukus Perempuan Parlemen tidak memaksimalkan perannya sebagai perwakilan perempuan di parlemen dalam mengupayakan kebutuhan-kebutuhan perempuan dengan mengusulkan Peraturan Daerah yang pro gender. Hambatan dalam Kaukus Perempuan Parlemen secara internal belum dapat berkumpul secara berkala karena terkendala oleh waktu.

Kata kunci : *Networking Institutionalism*, kebijakan pro gender, Kaukus Perempuan Parlemen Lampung

ABSTRACT

NETWORKING INSTITUTIONALISM IN OPTIMIZING PRO GENDER POLICY BY KAUKUS PEREMPUAN PARLEMEN LAMPUNG

By :

Khairunnisa Maulida

The Regional Representatives Council (DPRD) of Lampung Province has 12 female members. Women's representation in parliament is expected to fight for pro-gender policies. The purpose of this study was to determine networking institutionalism in the optimization of pro-gender policies by the Lampung Women's Parliament Caucus. The theory used in this study is networking institutionalism. This study used descriptive qualitative method. Informants in this study were the Lampung Parliament Women's Caucus, Social Service, Education Agency, Health Service, Women's Empowerment Service and Child Protection of Lampung Province and political observers at the University of Lampung. The results showed that in the optimization of pro-gender policies by parliamentary female members who were also members of the Lampung Parliament Women's Caucus, they had networked with the General Election Commission (KPU), academics, mass media, Non-Governmental Organizations, Regional Apparatus Organizations, Lampung Province DPRD and Dinas Women's Empowerment and Child Protection of the Lampung Province. Budget of the Lampung Parliament Women's Caucus is attached to the Women's Empowerment and Child Protection Office of Lampung Province. The Women's Caucus of the Lampung Parliament carried out the activity and the Women's Empowerment Service monitored through the Accountability Report of the activities carried out by the Lampung Women's Caucus. Women's Caucus Parliament has not maximized its role as a representative of women in parliament in seeking women's needs by proposing pro-gender regional regulations. Constraints in the Women's Caucus Parliament internally has not been able to gather regularly because it is constrained by time.

Keywords: Networking Institutionalism, pro gender policy, Lampung Women's Caucus

***NETWORKING INSTITUTIONALISM* DALAM OPTIMALISASI
KEBIJAKAN PRO GENDER OLEH KAUKUS PEREMPUAN
PARLEMEN LAMPUNG**

Oleh:

KHAIRUNNISA MAULIDA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **NETWORKING INSTITUTIONALISM DALAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PRO GENDER OLEH KAUKUS PEREMPUAN PARLEMEN LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Khairunnisa Maulida**

No. Pokok Mahasiswa : **1516021003**

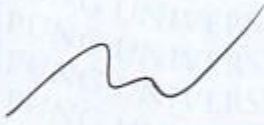
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

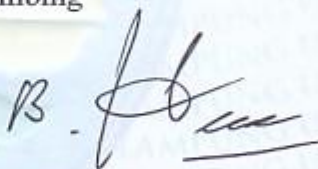
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002


Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

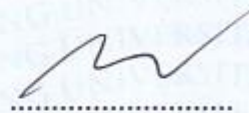
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Sekretaris : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Penguji : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **26 Februari 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan



Khairunnisa Maulida
NPM. 1516021003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan

**Khairunnisa Maulida
NPM. 1516021003**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Khairunnisa Maulida dilahirkan di Jakarta, pada 23 Juli 1997. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara putri dari Bapak Zainal Arifin, SE dan Ibu Tuti Herawati Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2002-2003 di TK Pertiwi Panaragan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dilanjutkan di SDN 1 Panaragan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2003-2009.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Tulang Bawang Tengah tahun 2009-2012 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Tulang Bawang Tengah tahun 2012-2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2015.

Selama masa perkuliahan penulis pernah berhimpun dalam beberapa organisasi. Penulis pernah menjadi anggota Muda LSSP Cendekia FISIP Unila tahun 2015-2016, Penulis pernah menjadi anggota magang LPM Republica tahun 2015-2016, menjadi Dana Usaha HMJ Ilmu Pemerintahan tahun 2016-2017, menjadi Staff BEM FISIP Unila tahun 2016 dan Penulis menjadi Sekretaris Umum HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP Unila tahun 2017-2018. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus.

MOTTO

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit”
(Nabi Muhammad S.A.W)

“Everything will come to those who keep trying with determination and patience”
(Edison)

“Kamu Lebih Kuat dari Apa yang Kamu dan Orang Lain Pikirkan”
(Khairunnisa Maulida)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahrabbi'l'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kakakku dan adik-adikku yang ku sayangi
sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “*Networking Institutionalism* dalam Optimalisasi Kebijakan Pro Gender oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Tuti Herawati dan Zainal Arifin, SE atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya, Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan kalian.

2. Kakak dan adik-adik kandung penulis, Retma Aulia Arifin, S.Pdi, Rizki Rahman Arifin, Nurul Alfiah dan Siti Muawwanah Terima kasih atas segala doa dan semangat serta cinta dan kasih sayang yang diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan orang tua kita.
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku pembimbing utama penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis, memotivasi dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga ibu selalu sehat dan sukses selalu.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku pembimbing Kedua penulis. Terima kasih ilmu, saran, semangat dan saran guna terciptanya skripsi ini, Semoga segala kebaikan bapak mendapat balasan dari Allah SWT dan kebaikan selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi, S.IP., M.A selaku dosen pembahas. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya progres yang signifikan terhadap skripsi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
8. Seluruh dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang.

9. Sahabatku, saudaraku, Muna Waroh, Liana Pricilia Sari, Shelvy Oktavia S, Adi Kurniawan, Aldo Adrias Pratama, Dwi Ari Wahyudi, Verlia Agustina, dan Ade siska Yuspita terima kasih sudah menemani sejak masa SMA hingga sekarang. Semoga kalian selalu dimudahkan segala urusannya, dan bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktu. Semoga Allah SWT selalu melindungimu dimanapun kalian berada,
10. Sahabat- sahabatku yang selama ini menemani Penulis di kampus, Aprilia, Annisa Erlitsya Marchelina, Widia Novita LukitaSari dan Amelisa Nurzahara Terimakasih atas kenangan indah yang akan selalu dikenang oleh Penulis. Allah SWT telah mempertemukanku dengan orang-orang yang baik, selalu membimbing, memberikan masukan, dan membantu penulis dalam segala hal dikampus. Maaf atas kepancean yang pernah ada, itu semua karena tuntutan organisasi, walau gimanapun penulis sayang kalian. Sukses untuk kalian. Semoga semua urusan kalian dipermudah, dan selalu dalam Lindungan Allah SWT.
11. Teman-Teman Seperbimbinganku Merita Andriani, Allah SWT mempertemukan dengan orang baik yang selalu membantu penulis dan ikut menemani penulis dalam mencari data. Sukses selalu Mer, Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang pernah dilakukan, Safta Adrian, Arif Kurniadi, Putri Wahyu, Irda Yustina terimakasih untuk kalian yang selalu menemani penulis disaat bimbingan dan menjadi teman untuk bercanda disaat penulis pusing revisi, gedung D lantai 1 menjadi tempat paling bersejarah untuk penulis.
12. Teman- Teman Ilmu Pemerintahan 2015 Neng, Destri, Ifa, Vina, Lisda, Kadek, Indah, Tyas, Arum, Diska, Ani, Ellen, Dara, Aca, Iga, Intan, Santini, Dina, Anisa

Rizki, Ayuni, Yanda, Meisandra, Untsa, Fadel, Juki, Candra, Ikhsan, Robi, Fikri, Fajar, Riko P, Richo, Hendra, Riyo, Hengki, Aviv, Hadian, Redi dan lain-lainnya penulis tidak bisa menuliskan semuanya karena sudah malam. Terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus. Sukses untuk kalian semua. Aamiin

15. Adik-adik 2016 yang sangat penulis sayangi sebagai sebuah geng lambe turah yang hobi gosip, Tri Ayu Sartika Zanti, Lanina Aprilia, Ara Arilia, Selvi Sancia, Restita Amalia, Ria Putri Wahyuni dan Mia Nophita. Terima kasih atas segala kenangan, segala pujian sekaligus hinaan, kasih sayang, waktu mendengarkan dan didengarkan, motivasi dan gosip yang kalian berikan sehingga menjadi semangat penulis dalam menulis skripsi. Selalu solid untuk kalian. Suatu kebanggaan bagi penulis bisa kenal dengan kalian. Semangat untuk Kapitanya!

16. Adik-Adik HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2018 Allif Panzha, Bari Arla, Aziz, Sindy terimakasih atas semua kebaikan kalian, semangat terus untuk menjalankan amanah yang diemban dan semangat kapitanya ya hehe.

17. Adik tingkat 2017 yang mengisi hari-hari diakhir perkuliahan penulis, Clara Martinez Dainira terimakasih sudah mau mendengar semua dinamika skripsi yang penulis lewati dalam menyelesaikan skripsi ini, walaupun kamu belum cukup umur untuk mendengar dinamika itu hehe, terimakasih untuk selalu mau digupekin disetiap waktu dan selalu ada diwaktu yang tepat. Maaf udah selalu nelpon kamu dan gupekin kamu, itu semua akan penulis kurangi hehe. Bangga udah bisa kenal sama kamu. Semangat untuk kamu, lakukan yang terbaik. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan kesehatan dan selalu dalam Lindungan Allah SWT. Aamiin.

18. Adik-adik 2017 Harjuno Saputro, Annisa Maulina, Reynaldo Maulana, Zakia Salsabila, Khusnul Khotimah, Hania Saputri, Agung Ilham, Dedemas, Rahmania, Elisa, Restu Ana, Humaira, Dinda terimakasih atas kebaikan kalian kepada penulis, Semangat kuliahnya diks.
19. Iranda Putri, S.IP terimakasih mba atas bimbingan dan nasihat serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga cepet dapet kerja ya mba, jangan gala uterus ya hehe. Terimakasih sudah menjadi Mba yang baik. Semoga semua kebaikan mba di balas Allah SWT. Aamiin.
20. Teman-Teman yang sudah mengisi waktu penulis selama 40 hari KKN di Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Terimakasih Tanty, habibi, bang Hotman, Mba Cici, Bang Zain dan Nadia untuk segala kebahagiaan dan kesedihan yang sudah kita hadapi bersama. Semoga Kalian Sukses yaa. Terimakasih sudah mengukir kenangan indah yang akan selalu dikenang oleh Penulis.

Bandar Lampung, 23 Februari 2019

Khairunnisa Maulida

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendekatan Kelembagaan Baru	16
1. Sejarah Pendekatan Kelembagaan Baru.....	16
2. Konsep Institusionalisme	18
B. Konsep Feminisme.....	43
C. Konsep tentang Gender dan Politik.....	45
D. Hak Politik Perempuan	47
E. Kebijakan Responsif Gender	48
F. Kerangka Pikir	50

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	53
B. Fokus Penelitian	55
C. Informan	56
D. Jenis dan Sumber Data	57

E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Teknik Pengolahan Data	65
G. Teknik Analisis Data.....	66
H. Teknik Validasi Data.....	69
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Profil Kaukus Perempuan Parlemen Lampung	72
B. Visi dan Misi Kaukus Perempuan Parlemen.....	75
C. Tujuan Kaukus Perempuan Parlemen	77
D. Struktur Kepengurusan Kaukus Perempuan Parlemen	78
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kerjasama dalam Optimalisasi Kebijakan Pro Gender	81
B. Organisasi Kaukus Perempuan Parlemen dalam Memperjuangkan Kebutuhan Kaum Perempuan melalui Kebijakan di Parlemen	90
C. Transaksi Hubungan Sosial Kaukus Perempuan Parlemen dengan Lembaga Lain.....	98
D. Mobilisasi Politik dan Gerakan Sosial oleh Kaukus Perempuan Parlemen dalam Optimalisasi Kebijakan Pro Gender	108
E. Pengaruh sosial, Psikologi sosial dan Budaya Politik dalam Kaukus Perempuan Parlemen Lampung	115
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	120
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di ASEAN	2
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin 1955-2014.....	4
3. Persentase perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	12
4. Data Informan	55
5. Daftar Nama Anggota Kaukus Perempuan Parlemen dalam DPRD Provinsi Lampung 2015-2019.....	74
6. Tabel Jaringan Kebijakan Pada Networking Institutionalism oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung	89
7. Tabel Hasil Observasi dalam Organisasi Kaukus Perempuan Parlemen Lampung	96
8. Tabel Hasil Wawancara dalam Organisasi Kaukus Perempuan Parlemen Lampung	96
9. Tabel Hasil Dokumentasi dalam Organisasi Kaukus Perempuan Parlemen Lampung	97
10. Triangulasi Transaksi Hubungan Sosial Pada Networking Institutionalism oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung	108
11. Tabel Hasil Observasi dan Wawancara dalam Mobilisasi Politik dan Gerakan Sosial	113
12. Tabel Dokumentasi dalam Mobilisasi Politik dan Gerakan Sosial.....	113
13. Triangulasi Pengaruh Sosial Psikologi Sosial dan Budaya Politik dalam Kaukus Perempuan Parlemen Lampung	120

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas politik di seluruh dunia mengenai persoalan eksistensi dan keterwakilan perempuan di dalam proses pembuatan kebijakan adalah hal yang penting. Politik dinormakan secara luas untuk mampu melibatkan peran dan partisipasi perempuan pada proses di dalamnya. Terlebih lagi di dalam sistem demokrasi yang berkembang di banyak negara saat ini, termasuk Indonesia. (Editorial, 2011)

Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan yang berada di parlemen Indonesia berada di bawah 20%, tepatnya 19,8% dalam kategori Majelis Rendah di Tingkat ASEAN bersumber dari Inter-Parliamentary Union (IPU) tahun 2017.

Tabel. 1 Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di ASEAN

NO	Nama Negara	Persentase
1	Filipina	29,50 %
2	Laos	27,50%
3	Vietnam	26,70%
4	Singapura	23,80%
5	Kamboja	20,30 %
6	Indonesia	19,80 %
7	Malaysia	10,40 %
8	Myanmar	10,20 %
9	Brunei	9,10 %
10	Thailand	4,80 %

Sumber : Interparlementary Union Tahun 2017

Persentase Indonesia masih berada di bawah kuota parlemen sebanyak 30% yaitu masih berada pada angka 19,80%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 245 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Ketentuan tersebut bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada perempuan di partai politik agar dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan sebagai keterwakilan perempuan.

Partisipasi politik perempuan di Indonesia dilakukan dengan prinsip pemberian kuota. Partisipasi politik perempuan dalam dewan mendapatkan kuota 30%. Namun demikian, kuota tersebut masih belum menunjukkan realitas keterwakilan perempuan (Rodiyah,2013). Aturan-aturan formal mengenai keterwakilan perempuan di parlemen ini

mengindikasikan perhatian serius dari pemerintah dalam memposisikan keterlibatan perempuan dalam kancah politik.

Realitanya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sebesar 30% belum berhasil diwujudkan. Pada pemilu 2014, keterwakilan perempuan di parlemen mengalami penurunan dari 17,86 % menjadi 17,32 % atau setara dengan jumlah 97 orang anggota DPR perempuan dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang (Susiana,2014). Dengan data tersebut keterwakilan perempuan tidak terwakili kepentingannya di dalam legislatif. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut terkait masalah tersebut. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif diperlukan karena dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan secara garis besar dikarenakan oleh beberapa faktor. Pertama, budaya patriarki dimana dalam budaya ini perempuan dianggap sebagai pelengkap dalam dunia perpolitikan di tanah air. Faktor kedua ialah masih rendahnya kualitas perempuan baik itu di bidang politik maupun bidang sosial, seperti dalam bidang ekonomi. Seperti kita ketahui bahwa kaum perempuan banyak yang belum memahami dunia politik, mereka terjun di dunia politik tanpa bekal yang memadai, hal itu yang kemudian menjadikan kualitas perempuan masih rendah (Inwantoro, 2013).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di antaranya: Kondisi sosial budaya, birokrat partai yang di dominasi oleh laki-laki, adanya tafsir agama yang melarang wanita berkecimpung di ruang publik, faktor internal perempuan itu sendiri, kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan wanita dan kurangnya penyajian, dan promosi aktivitas perempuan di bidang politik (Muslimat, 2016).

Salah satu hak dan kewajiban perempuan adalah berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Peranan perempuan dalam menjalankan fungsinya dibadan legislatif belum mendapatkan tempat yang strategis, kedudukan laki-laki yang lebih mendominasi dalam menentukan kebijakan publik, biasanya perempuan hanya menjadi peserta dan penikmat kebijakan saja (Ardi, 2014).

Berikut ini di sajikan data keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dari tahun 1955- 2014 :

Tabel. 2 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014

Tahun Pemilu	Jumlah Persentase		Perempuan		Laki-Laki Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1955	256	94,12	16	5,88	272	100,00
1971	429	93,26	31	6,74	460	100,00
1977	423	91,96	37	8,04	460	100,00
1982	418	90,87	42	9,13	460	100,00
1987	441	88,20	59	11,80	500	100,00
1992	438	87,60	62	12,40	500	100,00
1997	442	88,40	58	11,60	500	100,00
1999	456	91,20	44	8,80	500	100,00
2004	485	88,18	65	11,82	550	100,00
2009	460	82,14	100	17,86	560	100,00
2014	463	82,68	97	17,32	560	100,00

S

Sumber : Komisi Pemilihan Umum , data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015.

Tabel 2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut jenis kelamin, tahun 1955-2014 diatas menjelaskan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan jenis kelamin. Dalam tabel tersebut terlihat jumlah persentase anggota DPR perempuan dan laki-laki dalam setiap pemilihan umum selalu dalam keadaan yang tidak stabil. Dari tahun 1955-2014 persentase keterwakilan perempuan tidak pernah mencapai 30%. Pada pemilu di tahun 2014, keterwakilan perempuan mengalami penurunan yaitu dari angka 17,86 % menjadi 17,32%. Hal tersebut berarti di perlukan perhatian khusus oleh pemerintah untuk menindaklanjuti terkait kesetaraan gender.

Ketua Organizing Committee (OC) Konsolidasi Nasional III Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) Ammy Amalia Fatma Surya menyatakan menurunnya persentase keterwakilan perempuan di pusat bukan tanpa sebab. Ammy menyatakan bahwa :

masih ada beberapa tantangan untuk meningkatkan representasi politik perempuan yakni tantangan kebijakan, kebijakan partai politik serta problem kapasitas dan kepercayaan diri perempuan. (Republica.co. id diakses pada tanggal 20 juni 2018, pukul 16.00 WIB).

Keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak dapat diabaikan. Keterlibatan perempuan sebagai agen dalam lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan harus diwujudkan dengan baik. Keterikatan hubungan dan karakteristik perempuan berdasarkan jenis kelaminnya menjadi hal yang penting dalam proses penyampaian aspirasi perempuan untuk pembuatan kebijakan negara di parlemen (Aisah, 2011).

Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini perlu menjadi perhatian penting. Keterwakilan perempuan di parlemen memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat suatu kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya untuk kesetaraan gender, sebab seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya.

Kehadiran perempuan dalam ranah politik menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan: Pertama, perempuan telah bekerja dibanyak bidang namun

tidak memiliki saluran politik, oleh karena itu diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, kedua, kebijakan-kebijakan negara memiliki dampak yang berbeda antar negara perempuan dan warga negara laki-laki. Ketiga, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perempuan tersebut seringkali dianggap sudah pasti terpenuhi oleh para anggota parlemen laki-laki. Padahal dilain pihak, kepentingan khusus perempuan tidak mendapatkan versi yang cukup dalam proses pengambilan kebijakan politik yang ada (Purwanti, 2017)

Anggota legislatif perempuan dapat memanfaatkan jaringan dan kerjasama dengan para aktivis perempuan. Adanya interaksi tersebut diharapkan kinerja mereka berperspektif dan berorientasi pengarusutamaan gender. Sehingga para legislator perempuan muncul inisiatif kebijakan berperspektif gender yang dapat diperjuangkan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia menjelaskan bahwa setidaknya ada tujuh Undang-Undang yang harus di ubah atau direvisi karena dinilai belum memperhatikan aspek keadilan gender. UU Perkawinan, UU PPLN (Perlindungan dan Penempatan Pekerja Luar Negeri), UU Perlindungan Nelayan, UU Kesetaraan dan Keadilan Gender, UU Kekerasan Seksual, UU Perlindungan PRT, dan UU Kesejahteraan Sosial. (<http://nasional.kompas.com>, diakses pada hari Senin, 24 September 2018, Pukul 07:01 WIB)

Pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia anak perempuan diperbolehkan menikah adalah usia 16 tahun. Batas umur

yang masih terlalu dini tersebut, dampak yang diberikan terhadap perempuan sangat banyak. Salah satunya yaitu terhadap pendidikan, banyak anak perempuan yang hanya bisa menempuh pendidikan hingga SLTA karena batas umur perkawinan tersebut. Bahkan, dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan pula perihal dispensasi umur. Dalam pasal tersebut dispensasi umur pernikahan anak bisa diminta kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Kebijakan responsif gender mempertimbangkan manfaat kebijakan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, baik menurut kelompok umur (tua-muda), kelompok ekonomi (kaya-miskin) maupun kelompok marginal. Terdapat tiga tujuan penting dalam Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan diajukan yaitu: Pertama, untuk menghentikan kasus kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak.

Kedua, sebagai sarana untuk memastikan bahwa hak spesifik perempuan menjadi komitmen banyak pihak untuk memenuhinya. Misalnya bangunan fasilitas toilet publik untuk perempuan harus lebih banyak, karena organ reproduksi perempuan spesifik membutuhkan waktu yang lebih banyak ketika dit toilet. Ketiga, dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan perlu ada pemberian diskriminasi positif untuk memastikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. (www.koalisiperempuan.or.id diakses pada 16 November 2018 Pukul 00:34 WIB).

Kebijakan yang berpotensi melindungi perempuan dan kelompok marginal dimasyarakat kini terabaikan. Hal itu terlihat pada tahun 2017, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) dan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) tidak menjadi prioritas program legislasi nasional 2018. Kedua RRU tersebut merupakan RRU yang strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan di Indonesia, dan sudah terlalu lama ditunda pembahasannya. Dengan penundaan tersebut, pekerja rumah tangga belum memiliki perlindungan hukum.

Perlindungan hukum untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi yaitu kerentanan dari tindak kekerasan, eksploitasi kerja hingga perbudakan modern. Upah yang rendah, ketidakpastian hari libur dan cuti, serta pemutusan hubungan kerja secara sepihak masih dialami oleh pekerja rumah tangga. Selanjutnya yaitu dalam hal kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Pendefinisian kekerasan seksual mengesampingkan fakta penderitaan yang dialami oleh korban secara fisik maupun psikis.

Dalam mewujudkan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan tentunya akan ditemui berbagai macam kondisi yang menjadi pendorong dan juga penghambat keberhasilan pencapaian kesetaraan tersebut. Salah satu tantangannya adalah dalam proses perumusan kebijakan publik yang akan berdampak dalam aplikasi masyarakatnya. Faktor pendorongnya adalah dengan adanya organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran,

dan fungsi pengawasan. Kaukus Perempuan Parlemen Lampung merupakan salah satu organisasi yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Salah satu misi Kaukus Parlemen Perempuan Republik Indonesia adalah menguatkan kelembagaan Kaukus Perempuan Parlemen sebagai institusi yang memastikan terjadinya pengarusutamaan gender dalam produk-produk kebijakan dan beranggotakan perempuan parlemen lintas partai politik. Dalam menjalankan roda organisasi, KPP RI akan menggunakan pendekatan berbasis keadilan gender dalam konteks ekonomi, sosial politik dan hukum sebagai alat analisa dalam melakukan pemetaan setiap persoalan sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sebagaimana amanat UUD 1945 , Pasal 28 B dan C (www.dpd.go.id di akses pada 22 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Meningkatkan partisipasi perempuan agar tidak terjadinya kesenjangan gender yaitu dengan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Partai Politik merupakan “biang” dari pemerintahan di sebagian besar negara di dunia saat ini. Mereka menyebarkan anggota-anggotanya di berbagai institusi vital pemerintahan lewat mekanisme pemilihan yang melibatkan rakyat (*electoral*), baik di eksekutif, legislatif maupun lembaga-lembaga politik lainnya. Oleh karena pemerintahan didominasi oleh “orang-orang partai”, maka segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan di semua level tadi tentunya sangat dipengaruhi oleh kepentingan partai politik.

Kepentingan partai ini merupakan sesuatu yang *taken for granted* dalam konsep ilmu politik ketika memasuki pemerintahan yang ada, dikarenakan akan sangat sulit bagi petinggi partai mengabaikan kepentingannya di jabatan pemerintahannya. Namun yang kemudian menimbulkan dinamika adalah ketika kepentingan tersebut tidak selaras dengan keinginan masyarakat atau kelompok-kelompok di masyarakat yang bisa menimbulkan apa yang disebut oposisi-oposisi politik. Istilah oposisi dalam banyak kasus sering disamakan dengan tekanan politik (*political pressure*)(Subhan,2010).

Pernyataan diatas di perkuat dengan hasil penelitian Nasirul Umam tahun 2013 menyatakan bahwa terbatasnya program dalam penampungan aspirasi masyarakat menjadikan keberadaan anggota dewan menjadi kurang maksimal karena telah keluar dari substansi keberadaan anggota dewan itu sendiri. Adapun dalam menanggapi sebuah keputusan, seorang anggota dewan diharuskan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh partai politiknya.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan dimana seorang anggota dewan tidak dapat secara leluasa dalam menyuarkan aspirasi masyarakat atau konstituennya karena terdapat keharusan untuk meminta persetujuan dari partai politik. Jadi, sangat dimungkinkan seorang anggota dewan mengambil sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan batin mereka masing-masing karena berseberangan dengan keinginan konstituen.

Kenyataan diatas memperlihatkan secara jelas bagaimana partai politik berperan besar dalam pengambilan keputusan di dalam lembaga legislatif baik di tingkat lokal maupun nasional. Adanya instruksi dari partai politik merupakan aturan yang harus dijalankan bagi setiap anggota dewan tanpa terkecuali, inilah yang kemudian disebut sebagai garis-garis prinsipil dari partai politik yang harus dijalankan oleh kader atau anggotanya. Dalam sistem perwakilan di Indonesia dikenal istilah fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai politik sebagai induknya. Dalam konteks disiplin partai, fraksi digunakan untuk mengontrol suara para anggotanya di parlemen guna tetap pada garis-garis prinsipil yang telah ditentukan oleh partai sebagai induknya.

Masih terdapat banyak kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang bias gender. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi), Komnas Perempuan Indonesia bahkan mencatat tidak kurang dari 29 perda yang secara substantive mendiskriminasi perempuan (Kompas, 18 Desember 2006). Bukti lain bahwa kebijakan pemerintah masih bias gender adalah status dan kondisi perempuan saat ini masihh belum mengalami perbaikan secara berarti.

Darmastuti dkk memperkuat realitas tersebut dengan hasil penelitiannya bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi, angka buta huruf perempuan yang masih tinggi, kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang semakin marak, diskriminasi upah baik di sektor formal maupun informal, terbatasnya perlindungan bagi buruh perempuan dan sebagainya, merupakan bukti bahwa kesetaraan gender masih menjadi impian, setidaknya hingga saat ini (Darmastuti, dkk, 2011).

Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung secara presentasi lebih baik, jika dibandingkan dengan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. Persentase perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Jumlah Anggota DPRD			Persentase
	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	
Provinsi Lampung	73	12	85	10,2%
Lampung Barat	32	8	40	20.00
Tanggamus	42	3	45	6.67
Lampung Selatan	39	6	45	13.33
Lampung Timur	39	6	45	13.33
Lampung Tengah	47	3	50	6.00
Lampung Utara	40	5	45	11.11
Way Kanan	36	4	40	10.00
Tulang Bawang	34	6	40	15.00
Pesawaran	29	6	35	17.14
Pringsewu	27	8	35	22.86
Mesuji	19	6	25	24.00
Tulang Bawang Barat	27	2	29	6.90
Kota Bandar Lampung	39	6	45	13.33
Kota Metro	18	7	25	28.00

Sumber : Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2014

Tabel 3. Persentase perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota diatas menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan di Provinsi Lampung presentasinya 10,2% dari 85 anggota DPRD dengan jumlah perempuan 12 orang dan laki-laki 73 orang. Persentase tersebut masih dibawah 30% ketetapan keterwakilan perempuan. Namun bagaimana perempuan di parlemen tersebut yang juga termasuk sebagai anggota Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dalam memperjuangkan kebijakan yang pro gender inilah yang menjadi perhatian untuk diteliti dalam hal melakukan jaringan kelembagaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah *Networking Institutionalism* dalam Optimalisasi Kebijakan Pro Gender oleh Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *Networking Institutionalism* dalam Optimalisasi Kebijakan Pro Gender oleh Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Lampung

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yakni :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kajian khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan Kaukus Perempuan Parlemen dalam Optimalisasi Kebijakan pro Gender.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dalam hal Optimalisasi Kebijakan yang pro Gender.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab sebelumnya peneliti telah membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Pada bab ini penulis akan menjabarkan tinjauan pustaka yang bertujuan agar pembaca mengetahui mengenai gambaran tentang metode, teknik dan teori yang berkaitan dari penelitian terdahulu dan dari beberapa ahli untuk mendukung serta memperkuat peneliti dalam melakukan penelitian.

A. Pendekatan Kelembagaan Baru (*New Institutionalism*)

1. Sejarah Pendekatan Kelembagaan Baru

Tahun 1950-an dominasi pendekatan institusional dalam ilmu politik sedemikian kuat sehingga asumsi-asumsi dan praktik-praktiknya tidak sepenuhnya ditentukan, namun mendapat kritikan secara terus menerus. Aktivitas inti dalam ilmu politik adalah deskripsi tentang konstitusi, sistem hukum, dan struktur pemerintahan, dan perbandingannya antar waktu dan lintas negara. Institusionalisme adalah ilmu politik. (Marsh dan Stoker 2011:108)

Faktanya, pada akhir 1980-an, institusionalisme telah menjadi normal lagi ketika keterbatasan internal dari paradigma baru menjadi jelas. Suatu institusionalisme baru telah muncul sebagai reaksi terhadap kurang tersosialisasikan dari pendekatan dominan dalam disiplin ini, baik behavioralisme maupun teori pilihan rasional telah membebaskan institusi tidak lebih dari preferensi individu.

Goodin dan Klingemann menggambarkan institusionalisme baru sebagai revolusi berikutnya dalam ilmu politik. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

“Institusionalisme baru beroperasi dengan definisi yang lebih ekspansif terhadap subyek masalahnya, dan kerangka teoritis yang lebih eksplisit. Institusi politik tidak lagi disamakan dengan organisasi politik, institusi dipahami lebih luas untuk menunjukkan suatu pola perilaku yang berulang dan stabil. Institusionalisme baru berkuat dengan konvensi informal kehidupan politik dan dengan konstitusi formal dan struktur organisasional. Institusionalisme baru mencermati bukan hanya dampak institusi terhadap individu, tetapi interaksi antara institusi terhadap individu, tetapi interaksi antara institusi dan individu. (Marsh dan Stoker 2011:108)

Para pengkritik institusionalisme tradisional menunjukkan keterbatasan teori ini dalam segi lingkup dan metode, hanya berkuat pada institusi pemerintahan, dan juga beroperasi dengan pemahaman terbatas tentang subjek masalahnya. Fokusnya adalah terhadap aturan formal dan organisasi serta terhadap struktur resmi pemerintahan dan bukannya pada konvensi informal serta

batasan institusional yang lebih luas tentang pemerintahan (diluar dan juga di dalam negara) (Marsh dan Stoker 2011:110).

2. Konsep Institusionalisme

March dan Olsen (dalam Marsh dan Stoker 2011:112) menegaskan bahwa institusi politik memainkan suatu peran yang lebih otonom dalam membentuk hasil politik, menyatakan bahwa organisasi kehidupan politik membuat suatu perbedaan yaitu menjadi :

“Agensi birokrat, komite legislatif, pengadilan yang berwenang meninjau kembali putusan hakim adalah arena untuk memperjuangkan kekuatan sosial, tapi mereka juga merupakan kumpulan prosedur operasi standard dan struktur yang mendefinisikan dan mempertahankan kepentingan”.

Dalam pemikiran institusionalis baru dalam (Marsh dan Stoker, 2011: 113-114) terdapat tujuh cabang pendekatan yaitu sebagai berikut :

- a. Institusionalis normatif, mempelajari bagaimana norma dan nilai yang dikandung dalam institusi politik membentuk perilaku individu. Institusionalis normatif menyatakan bahwa aturan dan struktur yang terlihat netral sebenarnya mengandung nilai (dan hubungan kekuasaan), dan menentukan perilaku yang tepat dalam *setting* tertentu.
- b. Institusionalis pilihan rasional menyatakan bahwa institusi politik adalah sistem aturan dan desakan yang didalamnya

individu berusaha untuk memaksimalkan kegunaan mereka. Institusionalis pilihan rasional menyangkal bahwa faktor-faktor institusi menghasilkan perilaku atau membentuk preferensi individu, yang mereka pandang sebagai ditentukan dari dalam dan relative stabil.

Institusi politik mempengaruhi perilaku dengan mempengaruhi struktur dari suatu situasi ketika individu memiliki strategi untuk mengejar preferensi mereka. Institusi menyediakan informasi tentang kemungkinan perilaku orang lainnya di masa depan, dan tentang dorongan dan hambatan yang dilekatkan pada arah tindakan yang berbeda.

- c. Institusionalis historis, melihat pada bagaimana pilihan yang dibuat tentang desain institusional sistem pemerintahan mempengaruhi pembuatan keputusan individu di masa depan.
- d. Institusional empiris, yang paling mirip dengan pendekatan “tradisional”, mengelompokkan berbagai jenis institusional dan menganalisis dampak praktisnya terhadap kinerja pemerintah.

- e. Institusionalis inetrnasional menunjukkan bahwa perilaku negara disetir oleh desakan struktural (formal dan informal) atau kehidupan politik internasional.
- f. Institusionalis sosiologis mempelajari cara institusi menciptakan makna bagi individu, memberikan teoritis yang penting bagi institusionalisme normatif dalam ilmu politik.
- g. Institusionalis jaringan menunjukkan bagaimana pola-pola interaksi yang diatur tapi seringkali informal antara individu dan kelompok bisa membentuk perilaku politik. Institusionalisme jaringan menyatakan bahwa nilai dan tujuan umum adalah perekat yang menjamin stabilitas jaringan.

Menurut institusionalis jaringan, baik perilaku yang diatur norma maupun strategis, tindakan rasional memainkan suatu peran dalam mereproduksi institusi seiring waktu. Institusional baru sebenarnya dibangun diatas wawasan terbaik institusionalisme tradisional, dalam konteks kerangka teoritis yang lebih eksplisit dan canggih. Oleh karena itu, titik awal yang disajikan oleh institusionalisme baru adalah dalam segi gerakan sepanjang enam garis analisis :

- a. Dari fokus terhadap organisasi menuju fokus pada peraturan

Institusi politik tidak lagi disamakan dengan organisasi politik, tetapi mereka dipandang sebagai sehimpunan aturan yang menuntun dan membatasi perilaku aktor individu. Sebagaimana yang dijelaskan Fox dan Miller (1995 : 52) dalam (Marsh dan Stoker 2011: 117) institusi adalah sehimpunan aturan yang ada didalam dan diantara organisasi dan juga dibawah , di atas dan di sekitarnya.

Meski organisasi tidak sama seperti institusi, dalam peran mereka sebagai subjek aktor kolektif terhadap desakan institusional yang lebih luas, dan juga sebagai arena yang di dalamnya aturan institusional dikembangkan dan diekspresikan.

- b. Dari konsepsi formal tentang institusi ke yang formal

Aturan formal harus dianggap bukan sebagai yang memberikan contoh aturan secara umum namun sebagai jenis aturan tertentu yang telah dirumuskan. Kebiasaan informal bisa memperkuat aturan formal. Aturan baru tentang pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi perwakilan dalam pemerintah daerah Inggris, misalnya mempengaruhi perilaku politick di kota-kota yang telah mempunyai tradisi kepemimpinan sipil yang kuat.

Kebiasaan informal yang dominan bisa juga mengalahkan peraturan formal atau berfungsi untuk memasukkan perubahan dalam aturan formal.

- c. Dari konsepsi statis tentang institusi menuju konsep dinamis

Stabilitas adalah suatu cirri institusi : Huntington (1968) mendefinisikan institusi politik sebagai pola perilaku yang stabil, bernilai dan berulang. Marsh dan Oslen 1989: 16 (dalam Marsh dan Stoker 2011: 118) memandang institusi sebagai pencipta dan penopang kelompok-kelompok organisasi yang tidak sempurna dan sementara dalam dunia politik yang berpotensi taraf permulaan.

- d. Dari berkubang dalam nilai menjadi posisi kritis terhadap nilai. Institusionalisme baru berusaha menemukan berbagai cara bagaimana institusi merangkum dan membentuk nilai-nilai kemasyarakatan, yang dengan sendirinya bisa diperseterukan dan dalam perubahan terus menerus. Pada pendekatan normatif, prosedur dan pengaturan yang tampak netral dipandang mengandung nilai, kepentingan, dan identitas tertentu. Pada pendekatan pilihan rasional , institusi tidak dipandang mempengaruhi preferensi, mereka pasti mencerminkan

suatu himpunan nilai yang relatif umum jika pendorong dianggap berfungsi secara setara bagi semua partisipan.

- e. Dari konsepsi institusi holistik menjadi terpisah-pisah
- Instusionalisme baru berfokus pada komponen institusi kehidupan politik: sistem pemilihan suara, pajak dan sistem keuntungan, pembuatan keputusan cabinet, pengaturan anggaran atau pembuatan kebijakan, hubungan intrapemerintah, atau aturan kontrak. Institusi semacam itu di ekspresikan melalui struktur formal dan prosedur resmi, tapi juga melalui pemahaman dan kebiasaan yang tak terucapkan yang melampaui batas-batas organisasi baik didalam maupun diluar sektor publik.

Institusi dipahami sebagai terbedakan dalam pengertian bahwa mereka tidak harus cocok satu sama lain secara keseluruhan, atau memiliki solusi yang diperlukan secara fungsional. Institusi juga terbedakan dalam pengertian mereka mewujudkan , memelihara dan memberi sumber daya kekuasaan yang berbeda-beda berkaitan dengan individu dan kelompok yang berbeda.

Institusi mewujudkan hubungan kekuasaan dengan mengistimewakan arah tindakan tertentu dan meminggirkan aktor lainnya. Sumber ketiga

pembedaan internal muncul karena institusi tidak pernah sepenuhnya tertutup atau lengkap.

f. Dari independensi menjadi kemelekatan

Institusionalis baru menekankan bahwa institusi politik bukan entitas independen, yang eksis di luar ruang dan waktu. Sekalipun dari sudut pandang yang berbeda, institusionalis baru menjajaki cara institusi politik tertanam dalam konteks tertentu. Dengan membandingkan sistem politik, atau khususnya area kebijakan diberbagai negara, para institusionalis historis menunjukkan bagaimana institusi menunjukkan bagaimana institusi menjadi semakin melekat, menghasilkan pembuatan keputusan yang tergantung langkah.

Keanekaragaman institusi politik muncul sebagian karena interaksi mereka dengan institusi non politik pada tingkat lokal, yang menciptakan kesempatan untuk tidak hanya pada hal yang berlainan tetapi juga pada hal yang sama secara berlainan Clegg, 1990: 151 (dalam Marsh dan Stoker 2011: 120-121).

Dalam buku institusi politik oleh Rhodes dkk 2016, 23-75 terdapat beberapa pendekatan atau paradigma yaitu sebagai berikut :

a. Institusionalisme Rasional

Dalam pilihan rasional (*rational choice institutionalism*) terdapat dua sudut pandang yang dianut dalam melihat institusi. Pertama melihat institusi sebagai hambatan yang bersifat *eksogenus*, yaitu institusi adalah kumpulan aturan yang mengatur perilaku individu di dalam organisasi dan masing-masing individu tidak memiliki daya untuk merubahnya. Sudut pandang kedua melihat aturan dalam institusi diciptakan sendiri (bisa diubah-ubah) oleh para pemain didalamnya. Pada sudut pandang ini institusi merupakan cara ekuilibrium dalam melakukan sesuatu.

Asumsi dasar dalam institusionalisme rasional adalah aktor berinteraksi dalam lembaga dan organisasi, interaksi aktor dalam lembaga terikat oleh kepercayaan, tujuan, dan pendapat yang ada, serta aktor dan lembaga saling berinteraksi, lembaga/ organisasi lebih dominan membentuk proses politik di banding aktor. Unsur-unsur analisis dalam institusionalisme rasional adalah sebagai berikut :

- Aktor- aktor dan konteks lembaga
- Perilaku
- Strategi
- Pilihan-pilihan

- Informasi
- Evaluasi hasil yang mungkin
- Preferensi
- Hasil

b. Institusionalisme Konstruktivis

Konstruktivis institusionalis di motivasi oleh keinginan untuk menangkap, dan menginterogasi. institusionalisme historis biasanya berfungsi sebagai sumber awal inspirasi bagi institusional konstruktivis, semakin menjadi sumber dan titik awalan perubahan kelembagaan dari waktu ke waktu, institusionalisme historis cenderung ditandai dengan penekanan pada asal-usul institusional dengan mengorbankan akun post-formatif yang memadai perubahan kelembagaan. Selain itu, sejauh dinamika kelembagaan pasca-formatif telah dipertimbangkan.

Institusional konstruktivis menempatkan penekanan yang besar pada kemungkinan tidak efektif dan tidak efisien sifat institusi sosial; pada lembaga sebagai subjek dan fokus perjuangan politik; dan pada sifat kontingen dari perjuangan seperti itu hasil tidak dapat diartikan berasal dari konteks institusional yang ada itu sendiri. Ini adalah bahan analitis dasar dari institusionalisme konstruktivis pendekatan terhadap inovasi, evolusi, dan transformasi institusional.

Konstruktivis institusionalis menekankan tidak hanya ketergantungan pada jalur institusional, tetapi juga ketergantungan jalan ideasional. Dengan kata lain, ini bukan hanya institusi, tetapi ide-ide dengan berpredikat dan yang menginformasikan desain dan pembangunan, yang mengerahkan kendala pada otonomi politik. Lembaga dibangun pada yayasan-yayasan ideasional yang menggunakan jalan independen yang bergantung pada perkembangan selanjutnya. Institusionalisme konstruktivis dengan demikian berusaha untuk mengidentifikasi, merinci, dan menginterogasi sejauh mana proses normalisasi dan institusional didirikan melalui ide menjadi dikuasai.

Karya Peter A. Hall (dalam Rhodes dkk 2016: 66), khususnya tentang kebijakan paradigma, pembelajaran sosial, dan perubahan kelembagaan, telah terbukti sangat penting sumber inspirasi bagi banyak arus kontemporer dalam institusionalisme konstruktivis.

Kuhn, Hall berpendapat bahwa kebijakan dibuat dalam konteks "paradigma kebijakan". 'Skema interpretatif seperti itu diinternalisasi oleh politisi, manajer negara, ahli kebijakan, dan sejenisnya. Dengan berbagai macam teknik, mekanisme, dan instrumen kebijakan yang sah, dengan demikian membatasi target dan sasaran kebijakan itu sendiri. Hall

menguraikan: pembuat kebijakan biasanya bekerja dalam kerangka ide dan standar yang spesifik bukan hanya tujuan kebijakan dan jenis instrumen yang dapat digunakan untuk mencapainya, tetapi juga sifat masalah yang harus mereka tangani.

Konstruktivis kelembagaan memiliki perbedaan dengan kelembagaan. Klaim utamanya adalah perilaku para pelaku bukan (langsung) tetapi, lebih tepatnya reaksi khusus persepsi kepentingan material mereka. Konstruktivisme memiliki banyak hal untuk berkontribusi pada analisis kelembagaan kontemporer. institusionalisme konstruktivis berkontribusi pada analisis dan memberikan penjelasan tentang kompleks perubahan kelembagaan.

Institusionalisme konstruktivis menjelaskan bahwa institusi umumnya menghadapi perubahan, ketidakpastian, krisis, dan tantangan. Mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi baru. Aspek analisis dalam institusionalisme konstruktivis adalah : paradigma kebijakan, mempelajari lembaga di sekitar dan perubahan kelembagaan.

c. Institusionalisme Jaringan

Dalam beberapa hal, “jaringan kelembagaan” adalah istilah *oxymoron*. Istilah jaringan cenderung menyiratkan informalitas dan personalisme, sedangkan kata

“kelembagaan” menunjukkan formalitas dan impersonalisme. Perspektif jaringan juga cenderung lebih kepada perilaku institusi. Namun demikian, adalah wajar untuk memahami jaringan sebagai lembaga informal (meskipun mereka mungkin dalam beberapa kasus bersifat formal).

Dalam pengertian ini, jaringan dapat dianggap sebagai suatu lembaga mewakili pola perilaku interaksi atau pertukaran antar individu atau organisasinya merupakan pola yang stabil dan berulang. Peter Hall telah mendeskripsikan pandangan pendekatan kelembagaan yang memandang jaringan sebagai variabel mediasi penting yang mempengaruhi distribusi kekuasaan, konstruksi kepentingan dan identitas, dan dinamika interaksi.

Tidak ada satu paradigma jaringan kelembagaan yang eksis, yang terjadi adalah adanya diskusi yang tumpang tindih dalam ilmu politik, teori organisasi, administrasi publik, sosiologi dan ekonomi. Namun demikian terdapat empat prinsip atau asumsi dasar diberbagai uraian tentang pendekatan jaringan kelembagaan yaitu : Pertama, asumsi paling utama adalah perspektif relasional pada tindakan sosial, politik, dan ekonomi. Kontras relasional dengan pendekatan atribusi untuk penjelasan sosial. Fenomena dijelaskan dalam hal individu, kelompok, atau organisasi.

Pendekatan jaringan kelembagaan, sebaliknya, menekankan hubungan yang tidak dapat direduksi menjadi individu sebagai unit dasar penjelasan.

Asumsi dasar kedua adalah anggapan kompleksitas. Hubungan antar individu, kelompok, dan organisasi dianggap kompleks, dalam arti bahwa keterkaitan antara keduanya tumpang tindih dan lintas sektoral. Kelompok dan organisasi yang tidak rapi dibatasi, tentu tidak menyatu, dan sering saling meniadakan. Asumsi dasar ketiga dari pendekatan jaringan kelembagaan adalah bahwa jaringan yang baik menjadi sumber daya dan juga kendala pada perilaku. Sebagai sumber daya. Mereka adalah saluran informasi dan bantuan termobilisasi dalam mengejar keuntungan tertentu; sebagai kendala, mereka adalah struktur sosial dan kontrol yang membatasi tindakan.

Asumsi dasar keempat adalah jaringan itu memobilisasi informasi, ketidakmampuan sosial, sumber daya, dan modal sosial dalam berbagai macam cara yang sangat dibedakan. Jaringan menyediakan akses ke sumber daya, informasi, dan dukungan yang beraneka ragam.

Pendekatan jaringan kelembagaan menjadi kajian menarik dalam ilmu politik karena pertama, para ilmuwan politik telah lama tertarik mempelajari cara kerja dan pengaruh kekuasaan

melalui koneksi pribadi. Dalam hal ini jaringan kelembagaan memiliki daya tarik dengan menawarkan pendekatan yang sistematis. Kedua, banyak masalah dalam ilmu politik melibatkan tawaran yang kompleks dan hubungan koordinatif antara kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-lembaga publik atau bangsa.

Hubungan yang dimaksud dapat berupa “koalisi”, “faksi” atau “aliansi”. Dalam hal ini pendekatan jaringan kelembagaan dapat digunakan untuk menjelaskan dengan tepat pola hubungan politik. Ketiga. Pendekatan jaringan kelembagaan menolak setiap dikotomi sederhana antara penjelasan individualis dengan berorientasi kelompok. Ini menegaskan bahwa perilaku individu harus dipahami secara kontekstual, tetapi menolak asumsi kesatuan perspektif kelompok yang bermanfaat mengingat ketegangan dalam ilmu politik antara pendekatan individualis dan berorientasi kelompok.

Makna dari istilah “jaringan” memberikan survei singkat dari teknik yang digunakan untuk menganalisis jaringan, dan kemudian berfokus pada domain substantive dalam jaringan kelembagaan yang menonjol yaitu : a) jaringan kebijakan; b) organisasi; c) pasar; d) mobilisasi politik dan gerakan sosial; dan e) pengaruh sosial, psikologi sosial dan budaya politik.

Sebuah jaringan adalah serangkaian hubungan antara individu, kelompok, atau organisasi. Suatu hubungan misalnya persahabatan antara dua anggota parlemen atau pertukaran kerjasama antara dua lembaga-lembaga publik. Meskipun antara dua individu atau organisasi juga dapat dianggap sebagai suatu hubungan, jaringan kelembagaan cenderung lebih memperhatikan jenis hubungan yang positif.

Perspektif Durkheimian menjelaskan tentang solidaritas sosial, banyak studi jaringan menekankan dasar-dasar hubungan sosial dan basis affectual basis dari suatu hubungan. Namun, itu tidak berarti bahwa jaringan yang dimaksud harus jaringan yang memiliki solidaritas. Jaringan mungkin hanyalah pola interaksi atau koneksi. Misalnya, dua kelompok pemangku kepentingan dapat berinteraksi dalam konteks arena kebijakan atau dewan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mungkin berbagi direksi yang sama.

Hubungan tersebut tidak selalu menghasilkan solidaritas sosial dan hasil yang konkrit. Tetapi mereka menyiratkan kemungkinan bahwa koneksi adalah saluran untuk informasi, ide, atau sumber daya. Interdependensi menawarkan cara ketiga untuk menafsirkan jaringan. Keunggulan tawar-menawar dalam hubungan politik membuat pendekatan pertukaran ini menjadi jaringan yang alami untuk ilmu politik.

Granovetter (1985) berpendapat bahwa pendekatan jaringan sosial mengarahkan suatu kursus antara *oversocialized* (norma ditentukan) dan *undersocialized* (kepentingan diri sendiri) ditentukan) pemahaman tentang perilaku sosial.

Dari perspektif ini, jaringan sosial memiliki dimensi sosial dan instrumental (pertukaran). Namun, Granovetter menyarankan, aktor sosial tidak diatur oleh norma-norma sosial Hubungan antara dua aktor adalah unit dasar dari setiap jaringan. Namun, pendekatan jaringan biasanya tertarik pada rangkaian interkoneksi hubungan Istilah jaringan biasanya mengacu pada agregat yang saling berhubungan hubungan. Oleh karena itu, jaringan yang paling sederhana sebenarnya membutuhkan setidaknya tiga aktor berbeda. Sebagian besar analisis jaringan berkaitan dengan sifat global jaringan sebagai struktur sosial tunggal yaitu, sebagai agregasi yang saling berhubungan.

Dalam jaringan analitik, hierarki organisasi adalah salah satu jenis yang khas dari jaringan. Bawahan yang terhubung dengan atasan mereka, yang pada gilirannya terhubung dengan atasan mereka, sampai mencapai puncak piramida. jaringan berbeda dari hierarki. Seperti yang ditunjukkan oleh Kontopoulos (1993), perbedaannya adalah bahwa hierarki

dibedakan dengan “banyak-ke-satu” hubungan, dimana banyak bawahan terkait dengan hanya satu yang lebih tinggi.

Sebuah jaringan sebaliknya “terjerat” pada jaringan hubungan yang ditandai dengan hubungan “banyak-ke-banyak”. Dengan demikian, jaringan dapat dibedakan baik oleh isi hubungan (hubungan berulang positif, dibangun di atas kewajiban bersama, suatu Visi, kepercayaan, dan timbal balik, dll.) dan oleh struktur globalnya.

Teknik dari analisis jaringan sosial yaitu identifikasi sentralitas dan “sub-kelompok”. Sentralitas adalah ukuran yang sangat berguna karena mengidentifikasi kepentingan relatif atau keunggulan aktor individu dalam jaringan berdasarkan informasi dari semua aktor dalam jaringan. Berbagai ukuran sentralitas telah dikembangkan yang berusaha untuk menangkap aspek yang berbeda dari apa artinya menjadi aktor sentral. Teknik analisis jaringan lainnya yaitu dengan mengidentifikasi “sub-kelompok” dalam jaringan, teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi perpecahan sosial atau faksi.

Analisis jaringan sosial juga membedakan antara “kohesi” dan “kesetaraan” sebagai dasar untuk sub-kelompok. Pendekatan kohesi menunjukkan bahwa sub-kelompok didasarkan pada kerapatan ikatan. Oleh karena itu, semakin

besar jumlah ikatan dalam suatu kelompok, seharusnya semakin kohesif. Sebaliknya, pendekatan kesetaraan berpendapat sub kelompok akan terdiri dari aktor yang memiliki hubungan setara dengan pihak ketiga. Perbedaan antara kohesi dan kesetaraan terkait dengan serangkaian diskusi yang lebih luas dalam analisis jaringan.

Perspektif kohesi menunjukkan bahwa mekanisme penting dalam jaringan beroperasi melalui hubungan langsung. Perpanjangan dari logika ini menunjukkan bahwa jika interaksi lebih sering dan intens maka hubungan akan lebih kohesif. Pada tingkat jaringan global, kemudian, jaringan yang lebih padat dianggap menjadi yang lebih kohesif. Logika meluas ke beberapa jaringan. Analisis jaringan mengacu pada situasi di mana dua aktor terikat bersama dalam jenis yang berbeda dengan cara misalnya persahabatan, saran, atau rekan kerja.

Ada dua cara yang digunakan dalam mengumpulkan data pada analisis jaringan sosial. Pertama cara egosentris, cara ini dimulai dengan mengetahui dan mewawancarai aktor vocal/dominan (*ego*) di jaringan dan kemudian mengumpulkan informasi jaringan pada hubungan ego kepada orang lain (*alter*). Setelah itu fase berikutnya mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang hubungan antara ego dengan alter.

Masalah umum dengan data egosentris adalah bahwa hal itu sangat selektif, karena definisi jaringan hanya mencerminkan “ego”. Padahal jaringan yang lengkap menyediakan perspektif yang lebih komprehensif.

Data lengkap untuk jaringan dikumpulkan dengan mengidentifikasi kelompok pelaku dan kemudian mengumpulkan informasi tentang hubungan di antara mereka. Data tersebut sulit untuk dikumpulkan karena dua alasan. Pertama, mengidentifikasi hubungan antara semua aktor dalam jaringan menciptakan volume besar data bahkan untuk sejumlah kecil pelaku.

Kedua, jaringan lengkap menghadapi masalah spesifikasi batas. Analisis jaringan umumnya memecahkan masalah dengan teknik yang berbeda untuk mengumpulkan data. Salah satu pendekatan adalah menentukan batas pada awal atas dasar non-jaringan, kriteria misalnya batas organisasi atau unit kerja, kebijakan sektor, atau unit geografis.

Dalam kasus seperti itu, seringkali berguna untuk memulai dengan yang lengkap daftar individu, kelompok, atau organisasi yang terkandung dalam batas ini. Pendekatan kedua sering digunakan ketika batas sulit untuk ditentukan. Bahkan, identifikasi yang merupakan bagian dari jaringan mungkin salah satu tujuan utama untuk mengumpulkan data.

Dalam hal ini, *snowball sampling* digunakan untuk mengumpulkan data jaringan. Sama seperti data egosentris, pendekatan ini dimulai dengan mewawancarai beberapa aktor kunci dan kemudian meminta komentarnya tentang hubungan mereka. Kemudian meminta mereka menentukan yang berhubungan dengannya pada wawancara putaran pertama.

1. Jaringan Kebijakan

Literatur jaringan kebijakan itu sendiri muncul pada konklusi beberapa aliran penelitian. Pengembangan konsep jaringan kebijakan muncul dari sub-pemerintah. gagasan bahwa pembuatan dan penerapan kebijakan dikontrol oleh sekelompok agensi, legislator, dan kelompok minat terpilih. Heclo (Rhodes dkk,2016:80) menciptakan istilah “jaringan masalah” untuk mendeskripsikan lebih banyak bentuk keterkaitan daripada yang tersirat oleh istilah ‘sub-pemerintah’ atau “Segitiga besi”.

Pembuatan kebijakan dan implementasi membutuhkan koordinasi dan negosiasi yang rumit di antara banyak aktor yang berbeda. Jaringan kebijakan tumbuh pada studi kekuatan komunitas yang pada dasarnya menguji sosial struktur politik di kota-kota.

Semua pendekatan ini menggabungkan dua gambar politik yang agak bertentangan organisasi dan proses: semuanya menekankan bahwa struktur dan proses politik sangat terbagi-bagi, yang terdiri dari partisipasi dari beragam aktor itu menunjukkan bahwa para aktor ini saling terkait di sekitar minat mereka atau interdependensi dalam domain kebijakan spesifik. Dengan demikian, pendekatan jaringan memiliki keuntungan mewakili ide-ide dari kedua pluralis (menekankan differentiation) dan ahli teori elit (menekankan konektivitas).

Generasi selanjutnya dari penelitian jaringan kebijakan mulai memperjelas perbedaan internal ke jaringan dan mengartikulasikan mekanisme dimana mereka bekerja. Rhodes membedakan konsep Heckscher tentang "jaringan isu" dari "kebijakan komunitas" dalam hal stabilitas dan pembatasan jaringan. Dia juga mengartikulasikan perspektif 'kekuatan-ketergantungan' yang menyediakan kerangka kerja untuk memikirkan mengapa dan bagaimana jaringan dibentuk dan bagaimana mereka beroperasi. Di sebuah tinjauan terbaru dari literatur jaringan kebijakan.

2. Organisasi

Studi tentang organisasi adalah bidang lain dimana kelembagaan jaringan terwakili dengan baik. La Porte (1975) mendefinisikan kompleksitas organisasi dalam hal jumlah unit dan jumlah interkoneksi antara unit-unit ini. memberikan prekursor awal untuk institusionalisme jaringan ini. Pergeseran ke perspektif sistem terbuka, terutama dengan fokusnya yang meningkat hubungan interorganisasional, memberikan dorongan lain. Benson (1975) politik pendekatan ekonomi terhadap hubungan antarorganisasi mengklaim 'jaringan' dari organisasi adalah unit analisis baru. (Rhodes dkk 2016:82)

Satu dekade atau lebih kemudian, peningkatan kemampuan ekonomi kelembagaan yang disediakan konteks lain untuk artikulasi ide jaringan. Oliver Williamson mengajukan "pasar 'dan hierarki' sebagai dua cara pengorganisasian alternatif transaksi ekonomi. Kerangka kerja menempatkan organisasi pada suatu kontinum antara kontrak (pasar) dan otoritas (hierarki). Powell (Rhodes 2016:82) berpendapat bahwa "organisasi jaringan' bukanlah pasar atau pun hierarki. Dia berpendapat bahwa organisasi jaringan mencapai koordinasi melalui kepercayaan dan timbal balik daripada melalui kontrak atau otoritas. Organisasi menunjuk pada

aspek struktural yang membuat mereka sulit untuk menggambarkan baik sebagai pasar atau sebagai hierarki.

Nohria dan Eccles 1990 (Rhodes 2016:82) memberikan dorongan tambahan untuk memikirkan organisasi sebagai jaringan. Fragmentasi penyampaian layanan dan kompleksitas proses implementasi menjadi perhatian utama literatur ini. Satu tema umum adalah bagaimana mencapainya koordinasi di antara berbagai lembaga publik dengan misi yang tumpang tindih dan wewenang.

3. **Transaksi Hubungan Sosial**

ekonomi politik dan sosiologi ekonomi juga telah menggunakan gagasan jaringan untuk mengkonseptualisasikan pasar dan dinamika pasar, dan untuk menggambarkan hubungan antara negara dan pasar. Granovetter memberikan pernyataan tentang pendekatan jaringan pasar bahwa organisasi jaringan berbeda baik dari pasar atau hierarki, Granovetter berpendapat bahwa banyak transaksi ekonomi dibentuk oleh hubungan sosial yang dibangun di atas norma kepercayaan dan timbal balik. (Rhodes 2016:83).

4. Mobilisasi Politik Dan Gerakan Sosial

Konsep jaringan juga memiliki dampak signifikan dalam studi politik mobilisasi dan gerakan sosial. Diani (1995) menggunakan pendekatan jaringan untuk menggambarkan hubungan antara organisasi lingkungan dan antara aktivis lingkungan di Milan. Dengan keanggotaan dalam organisasi protes bawah tanah di Polandia, Osa (2003) menjelaskan bagaimana gerakan Solidaritas yang kuat muncul untuk menantang Komunis rezim. (Rhodes 2016:84).

Diani dan McAdam (2003) memberikan gambaran tentang hubungan tersebut antara gerakan sosial dan jaringan. Pekerjaan yang terkait erat dengan para ilmuwan politik telah memperhatikan jaringan internasional LSM yang dijuluki " transnasional jaringan advokasi (Rhodes 2016:84).

5. Pengaruh Sosial, Psikologi Sosial, dan Budaya Politik

Pendekatan jaringan juga telah digunakan untuk memahami pola-pola sosial, kognisi sosial, dan budaya politik. Krackhardt (1990) konsep jaringan kognitif adalah salah satu ide yang paling menarik dalam genre ini. Dalam mempelajari komputer Wrm, Krackhardt menemukan bahwa karyawan lebih terpusat sebenarnya

jejaring sosial juga lebih akurat dalam pemahaman kognitif jaringan sosial mereka (jaringan kognitif). Psikolog sosial juga menggunakan pendekatan jaringan untuk memodelkan bagaimana proses ketidakefisienan jaringan sosial bekerja . (Ansell dalam Rhodes 2016:85)

Friedkin (1998) memberikan pendekatan yang kuat untuk mempengaruhi pemodelan ini. Dalam ilmu politik, proses jaringan juga dipahami sebagai suatu cara untuk memodelkan efek kontekstual secara tepat. Ilmuwan politik telah menggunakan jaringan model ini untuk menganalisis ketidakcocokan tetangga pada sikap politik terhadap kandidat (Huckfeldt dan Sprague 1987).

Mempelajari kognisi dan ketidakmampuan sosial, pendekatan jaringan juga telah diterapkan untuk mempelajari budaya politik. Mohr dan Analisis jaringan Duquenne (1997) tentang evolusi historis kesejahteraan sosial kategori dalam studi New York City dan Ansell (1997) tentang bagaimana jaringan institusional dan simbol-simbol berinteraksi untuk menghasilkan penataan kembali institusi kelas Perancis.

B. Konsep Feminisme

Pemaknaan istilah feminisme tidaklah tunggal melainkan kompleks. Definisi feminisme berubah-ubah sesuai dengan perbedaan-perbedaan realitas sosiokultural yang melatarbelakangi lahirnya paham tersebut dan akibat adanya perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang dilakukan oleh feminisme itu sendiri. Istilah feminisme pada umumnya diartikan sebagai ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelamin (gender). (Martana, 2010)

Feminisme muncul sebagai suatu gerakan dan himpunan gagasan yang ditujukan untuk meningkatkan status dan kekuasaan perempuan. Gagasan dan aktivisme feminis menyebabkan lebih banyak perempuan yang mulai terlibat dalam politik publik. (Stoker dan Marsh 2011: 136). Jenis aliran atau gerakan feminisme dalam sejarah perkembangannya dikenal cukup banyak yang masing-masing berbeda karakteristiknya. Perbedaan tersebut disebabkan asumsi dasar, pengalaman dan perspektif paradigmanya dalam memandang persoalan yang menyebabkan adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Para kaum feminisme sendiri memiliki perbedaan satu sama lain dalam melakukan pembagian dan pengelompokan aliran-aliran feminisme yang ada. (Martana, 2010)

Jenis aliran feminisme tersebut antara lain :

1. Feminisme liberal

Kaum feminisme liberal mendasari gerakannya pada prinsip-prinsip liberal yakni semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama dan setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar dari rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan dirinya untuk bisa bersaing dan tidak bergantung pada laki-laki.

2. Feminisme Radikal

Feminisme radikal mengembangkan feminisme yang lebih nyata dan lebih merdeka sepenuhnya sehingga dapat mencegah penyuborditan gender pada agenda tradisional. Oleh karenanya mereka menolak setiap kerjasama dan menjalankan langkah praktis dan teoritis untuk mengembangkan analisis gender. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki (sistem yang berpusat pada laki-laki). Aliran ini berupaya menghancurkan sistem patriarki yang fokusnya terkait fungsi biologis tubuh perempuan.

3. Feminisme sosialis

Feminisme sosialis menggambarkan posisi rendah perempuan dalam struktur ekonomi, sosial dan politik dari sistem kapitalis, serta adanya analisis patriarki (pemusatan pada laki-laki). Fokusnya adalah kapitalisme dan patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang tidak istimewa. Mereka berpendapat bahwa penghapusan sistem kapitalis merupakan cara agar perempuan mendapat perlakuan yang sama. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya, sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. (Karim, 2014)

C. Konsep Tentang Gender dan Politik

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya dan yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Gender merupakan nilai atau ketentuan yang membedakan identitas sosial laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam hal ekonomi, politik, sosial di dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa.

Istilah gender sering diartikan sebagai jenis kelamin (seks). Kedua istilah memang mengacu pada perbedaan jenis kelamin, tetapi istilah seks terkait pada komponen biologis. Artinya : masing- masing jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) secara biologis berbeda dan sebagai

perempuan dan laki-laki mempunyai keterbatasan dan kelebihan tertentu berdasarkan faktor biologis masing-masing. Sebaliknya gender adalah hasil sosialisasi dan enkulturasi seorang atau gender adalah hasil konstruksi sosial yang terdiri dari sifat, sikap dan perilaku seorang yang ia pelajari (Ihromi dkk, 2000: 4)

Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminisme adalah gabungan blok-blok bangunan dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita (Mosse, 2007:2).

Pada dasarnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu jenis kelamin dan gender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik, terutama pada perbedaan fungsi reproduksi. Sementara itu gender merupakan konstruksi sosio-kultural. Pada prinsipnya gender merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin. Pada umumnya jenis kelamin laki-laki berhubungan dengan gender maskulin, sementara jenis kelamin perempuan berkaitan dengan gender feminim.

Gender tidak bersifat universal (Ridjal dkk, 1993:30). Ia bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal :

1. Gender tidak identik dengan jenis kelamin
2. Gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat

D. Hak Politik Perempuan

Hak-hak politik selalu menyiratkan partisipasi individu dalam membangun opini publik, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di DPR atau pencalonan diri mereka menjadi anggota perwakilan tersebut. Hak-hak politik dan hukum perempuan selama ini masih semu, artinya terus menerus berada dibawah kekuasaan laki-laki dalam masyarakat Indonesia yang menganut paham patriarkhi. Kebijakan-kebijakan politik harus dilihat dari perspektif gender. Penegasan hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Conventions On the Political Rights*).

Ketentuan dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan sebagai berikut :

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional

dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi.

3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi. (Hardjaloka, 2012)

E. Kebijakan yang Responsif Gender

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini digunakan secara regular dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan (Thoha, 2014:61)

United Nation Development Programme (UNDP) mengemukakan keadilan (*equity*) merupakan salah satu karakteristik *good governance*. Karakteristik *equity* artinya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Peran sektor publik dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan (Sedarmayanti, 2007:13).

Kebijakan responsif gender pada hakekatnya merupakan manifestasi dari salah satu prinsip *good governance* tersebut. Upaya kebijakan responsif gender yaitu dengan mempertimbangkan manfaat kebijakan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki. Ada beberapa strategi

untuk menjalankan kebijakan agar tidak bias gender. Pertama, pastikan para pelaksana memahami bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan pro gender. Kedua, memastikan bahwa ada mekanisme *reward* dan *punishment* bagi pematuh dan pelanggarnya. Ketiga, mempunyai ukuran kinerja yang pro gender. Keempat, mengevaluasi kinerjanya.

Perempuan dalam politik kesejahteraan adalah upaya untuk mewujudkan pengakuan atas status dan kewarganegaraan perempuan (*citizenship*) dalam kebijakan publik. Kebijakan publik yang berperspektif perempuan dengan demikian adalah kebijakan yang mengakui keberbedaan perempuan (*difference*), mengakui kesetaraan (*equality*). (Sigiro, 2017)

Anggaran berspektif gender adalah penyusunan anggaran yang memperhatikan alokasi anggaran untuk kesetaraan dan keadilan gender. Bias gender dalam anggaran dapat ditemukan dari berbagai indikasi. Pertama, adanya alokasi sumber daya dalam anggaran yang menguntungkan gender tertentu. Kedua, indikasi pengelolaan anggaran akan memunculkan kesenjangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan di antara kedua kelompok gender. Ketiga, fungsi stabilisasi ekonomi anggaran dikelola dengan memunculkan masalah ketidaksetaraan gender.

Upaya yang dilakukan guna menghapuskan ketidakadilan gender adalah dengan melaksanakan suatu strategi yang disebut dengan

Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Soejipto, 2010:48)

F. Kerangka Pikir

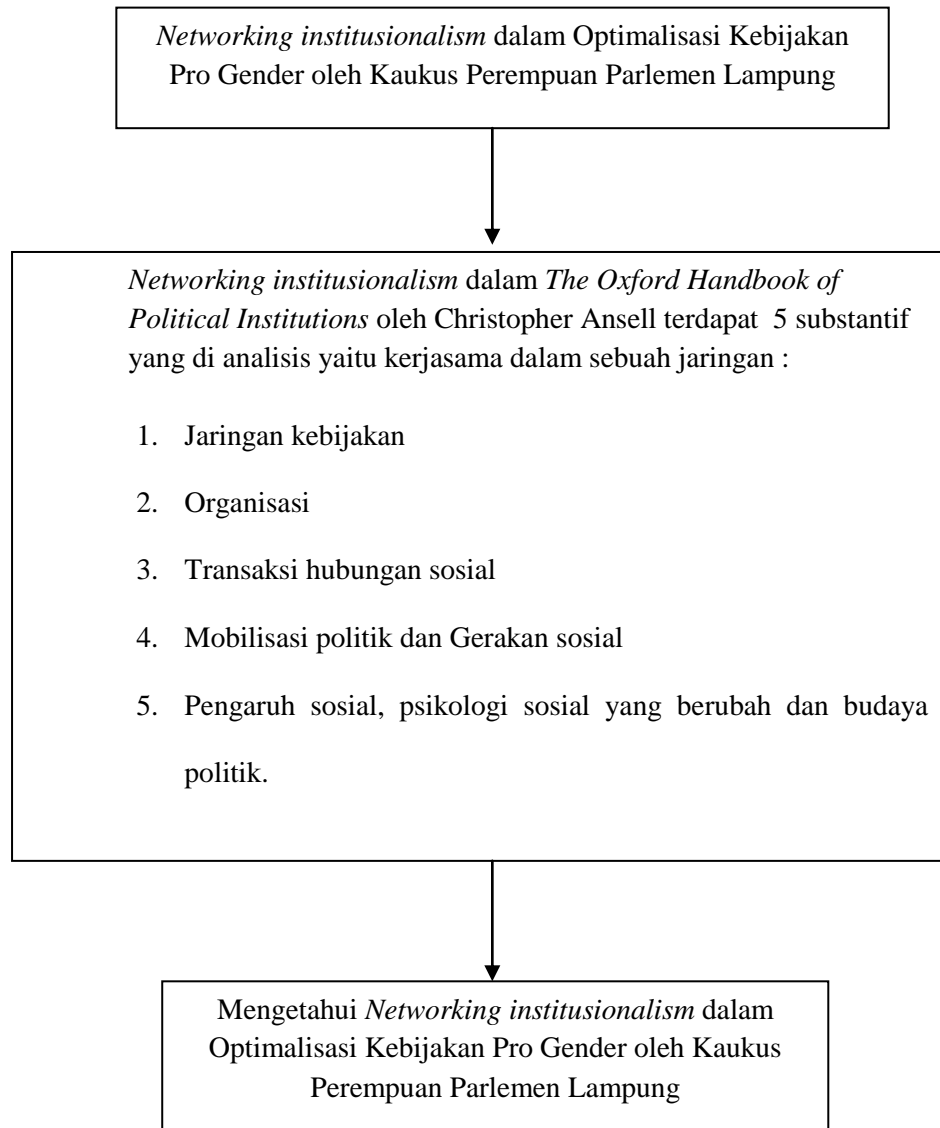
Peneliti memulai kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul *Networking Institutionalism* dalam Optimalisasi Kebijakan Pro Gender oleh Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Lampung ini dengan mengidentifikasi objek penelitian terlebih dahulu. Objek penelitian ini adalah Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung.

middle theory penulis menggunakan teori *network institutionalism* (jaringan institusionalisme) oleh Christopher Ansell dalam *The Oxford Handbook of Political Institutions* dengan jaringan itu adalah seperangkat hubungan individu, kelompok organisasi. Sebuah jaringan untuk melakukan kerjasama dengan yang lain. Terdapat lima substantif yang dianalisis berupa Jaringan Kelembagaan yaitu :

1. Kerjasama dalam optimalisasi kebijakan
2. Organisasi
3. Transaksi Hubungan Sosial

4. Mobilisasi politik dan Gerakan Sosial
5. Pengaruh sosial, psikologi sosial yang berubah dan budaya politik

Berikut adalah kerangka pikir penelitian :



Gambar I. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan atau untuk menjawab suatu permasalahan dengan menggunakan kriteria-kriteria ilmiah. Dengan demikian metode penelitian mencakup studi tentang cara-cara melakukan sebuah penelitian (Firdaus, 2012:10). Penelitian terhadap peran kaukus perempuan parlemen dalam optimalisasi kuota legislatif perempuan Lampung menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong,2014:5). Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Eko,2015:8).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic. Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6).

Metode deskriptif merupakan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal tersebut disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran-gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah dalam menganalisis sebuah fenomena sangat membutuhkan dukungan data yang diperoleh dengan tehnik wawancara. Selanjutnya yaitu pengkajian mengenai jaringan kelembagaan membutuhkan data lapangan yang

sifatnya tidak statistik atau diperhitungkan dalam sistem angka. Dengan metode penelitian kualitatif peneliti akan menelaah mengenai *networking institutionalism* dalam optimalisasi kebijakan pro gender yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Didalam rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan/atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Burhan, 2012:41). Peneliti sosial diharapkan jeli dan peka menangkap fenomena-fenomena yang muncul dalam ranah kehidupan sosial. Suatu fenomena dan praktik-praktik sosial yang layak diangkat sebagai fokus kajian penelitian adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan.

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis dengan menggunakan peran lembaga dari pemikiran Christopher Ansell tentang jaringan institusionalisme (*networking institutionalism*). Berdasarkan uraian diatas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peran dan interaksi kelembagaan yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dalam mengoptimalkan perannya melalui kebijakan-kebijakan yang pro gender. Hal penting yang akan diketahui dan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. kerjasama dalam optimalisasi kebijakan pro gender
2. Organisasi Kaukus dalam memperjuangkan kebutuhan kaum perempuan melalui kebijakan di parlemen
3. Transaksi Hubungan Sosial Kaukus dengan lembaga lain
4. Mobilisasi politik dan Gerakan Sosial yang dilakukan Kaukus dalam optimalisasi kebijakan yang pro gender
5. Pengaruh sosial, psikologi sosial yang berubah dan budaya politik dalam Kaukus Perempuan Parlemen

C. Informan

Memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *verstehen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Anis dan Kandung, 2014:9)

Penulis memfokuskan informan pada Kaukus Perempuan di Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta Pengamat Politik Universitas Lampung.

Tabel 4. Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Ririn Kuswantari, S.Sos,MH	Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Lampung
2.	Aprilliati, SH, MH	Sekretaris Kaukus Perempuan Parlemen Lampung
3.	Dra. Ida Yulisnawati	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Provinsi Lampung
4.	Renny Maisari, SE, MM	Kabid Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
5.	Drs. Teguh Irianto, M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
6.	Sadariah	Staf bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
7.	Zulius Alfandi	Dinas Kesehatan
8.	Haryati Lestari, S.Km., M.Kes	Kepala Seksi Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
9.	Dr. Dedy Hermawan. S.Sos., M.Si	Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung

Sumber: Diolah peneliti 9 Januari 2019

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah

benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis, yakni :

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Republik Indonesia (KPP RI) No. 03/SK-KPP RI/X/2015
- c. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kaukus Perempuan Parlemen
- d. Surat Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 8/DPRD.LPG/III.01/2017
- e. Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, majalah, website dan sebagainya. Artikel dalam penelitian ini di dapat dari

Lampung7news.com,subhanagung.blogspot.com,kppri.wordpress.com, Republica.co.id , Kompas.com, Tribunlampung.co.id.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data dengan seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain : mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain lain (Moleong, 2017:186).

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Dalam konteks ini berbagai jawaban di utarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understandings*) yang bersumber

dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukuan, dan gender (Norman dan Yvonna, 2009 : 495).

Wawancara juga diartikan sebagai bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Jadi wawancara diartikan sebagai proses interaksi dengan tujuan memperoleh informasi mengenai orang, organisasi, fenomena, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan panduan wawancara serta catatan-catatan wawancara terbuka dan wawancara tak terstruktur.

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara adalah melalui wawancara peneliti dapat mengetahui informasi ataupun hal-hal yang tersembunyi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Dengan teknik wawancara data yang dibutuhkan akan lebih akurat karena diperoleh dari sumbernya. Peneliti akan melakukan metode wawancara dengan menggunakan panduan wawancara.

Wawancara di dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta Pengamat Politik Universitas Lampung.

2. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik dalam memperoleh data melalui pengamatan terhadap suatu objek atau orang pada periode tertentu (Burhan, 2012:39). Bentuk alat pengumpulan data yang lain dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan, observasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian, mengingat setiap penelitian tidak menggunakan alat pengumpul data demikian, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 2011 :62-63).

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Dibandingkan dengan metode-metode yang terstruktur lainnya, metode observasi lebih memiliki fleksibilitas dalam membingkai gagasan kedalam realitas baru sekaligus menawarkan metode/cara baru untuk mengkaji realitas lama (Norman dan Yvonna, 2009: 530). Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi, dimaksud sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan peneliti.

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong,2017:174 ada beberapa alasan mengapa metode observasi dimanfaatkan yaitu :

1. Teknik observasi ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, karena pengalaman secara langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Ini dilakukan jika data yang diperoleh kurang meyakinkan.
2. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
3. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
4. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan ada data yang dijaringnya “menceng” atau bias. Kemungkinan menceng itu terjadi karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak antara peneliti dan yang mewawancarai, ataupun karena reaksi peneliti yang emosional pada suatu saat.
5. Teknik observasi memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Jadi pengamatan dapat menjadi alat yang ampuh untuk situasi-situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks.
6. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, observasi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data adalah dengan teknik observasi peneliti dapat mengamati hal-hal yang tidak dapat di dapat dari responden saat melakukan wawancara. Dengan metode observasi ini peneliti dapat mengamati secara langsung fenomena yang terjadi sebagai data tambahan dan memperoleh gambaran yang lebih jelas atas fenomena yang sebenarnya.

Peneliti melakukan observasi pada tanggal 30 Desember 2018 dengan mendatangi langsung Sekretariat Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dan berdasarkan hasil pengamatan Sekretariat tersebut jarang digunakan untuk anggota KPP Lampung berkumpul, melainkan mereka sering berkumpul di Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung. Observasi selanjutnya yaitu pada 25 Januari Peneliti ikut dalam kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Berdasarkan hasil pengamatan, dalam kegiatan bakti sosial terdapat dialog publik antara anggota KPP dengan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang

sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama. Aplikasi dari metode dokumentasi yaitu artikel-artikel yang dibaca peneliti mengenai gender dan kebijakan publik, kaukus perempuan parlemen dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Surat Keputusan Gubernur Lampung No : G/315/V.08/HK/2017
- c. Surat Keputusan Gubernur Lampung No : G/224/V.08/HK/2018
- d. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Republik Indonesia (KPP RI) No. 03/SK-KPP RI/X/2015
- e. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kaukus Perempuan Parlemen
- f. Data anggota DPRD Provinsi Lampung Lampung
- g. Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, majalah, website dan sebagainya.

F. Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yaitu setelah data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 2008 :240) terdiri dari :

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam (Moleong, 2017:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Dipihak lain, analisis data kualitatif Seiddel, 1998 dalam (Moleong,2017:248), prosesnya berjalan sebagai berikut.

- Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
- Mengumpulkan, memilah milah, mengklasifikasikan, mensintesisikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya,
- Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Milles dan Huberman, 1992:17) yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian membuang data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. *Display* (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari

catatan tertulis di lapangan. Misal data yang mendukung penelitian dari hasil yang ada dilapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Catatan-catatan penting dilapangan kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan dianalisis menggunakan teori yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian ini. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data

lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

H. Teknik Validasi/ Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2017:324) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria :

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan penelitian yaitu salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (dalam Patton, 2015:331) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (Patton dalam Moleong, 2014:331)

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

2. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban.

3. Kebergantungan (*Dependity*)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara

bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif.

Untuk memeriksa kebenaran data, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan data hasil wawancara kepada informan yang berbeda. Peneliti juga dapat melakukannya dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai macam sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dilakukan.

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber berupa hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan dan data dokumentasi yang peneliti serta hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan cara ikut dalam kegiatan Kaukus merupakan cara yang peneliti lakukan untuk menguji kebenaran data yang sebelumnya.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Profil Kaukus Perempuan Parlemen Lampung

Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia yang disingkat dengan KPP-RI dan selanjutnya disebut dengan Kaukus Perempuan Parlemen. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dalam bahasa Inggris adalah "*Women Parliamentary Caucus of the Republic of Indonesia*". Anggota kaukus perempuan parlemen adalah seluruh perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang tergabung dalam wadah Kaukus Perempuan Parlemen.

Lambang Kaukus Perempuan Parlemen RI adalah gambar gedung (logo) MPR RI. Anggota Kaukus Perempuan Parlemen mempunyai hak bicara dan hak suara, hak memilih pimpinan dan dipilih menjadi pimpinan/pengurus, hak membela diri, dan hak memperoleh penguatan kapasitas dan hak informasi. Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen RI adalah G.K.R. Hemas.

Pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung didasarkan dengan pertimbangan bahwa :

1. Masih tingginya permasalahan perempuan dan anak dalam berbagai bidang kehidupan, memerlukan upaya-upaya khusus untuk pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak-haknya oleh pengambilan keputusan.
2. Bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga pengambil keputusan turut mempengaruhi minimnya kebijakan untuk perlindungan perempuan dan anak.
3. Bahwa karena itu dipandang perlu dibentuk organisasi “Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia “ sebagai wadah berkumpulnya perempuan anggota parlemen dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia , Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota untuk mewujudkan persamaan akses dan kontrol antara laki-laki dan perempuan di lembaga MPR, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota serta pentingnya memastikan integrasi gender dan HAM dalam seluruh produk kebijakan.

Kaukus Perempuan Parlemen dibentuk di Lampung pada tanggal 31 Juli 2015 melalui rapat umum Kaukus Perempuan Parlemen. Jumlah perempuan di parlemen belum mencapai kuota 30% maka Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Lampung bergabung dengan perempuan parlemen di Kabupaten/Kota. Melalui rapat umum pada Maret 2015 dibentuk pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung masa bhakti 2014-2019. Wilayah tanggung jawab Kaukus

Perempuan Parlemen Lampung adalah se-Provinsi Lampung dengan koordinator-koordinator disetiap kabupaten.

Anggota Kaukus Perempuan Perempuan Parlemen Provinsi Lampung terdiri dari 12 orang perempuan dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung. Anggota tersebut tersebar dalam 5 komisi di DPRD Provinsi Lampung. Komisi I (Bidang Tugas Hukum dan Pemerintahan), Komisi II (Bidang Tugas Perekonomian), Komisi III (Bidang Tugas Keuangan), Komisi IV (Bidang Tugas Pembantuan), Komisi V (Bidang Tugas Kesejahteraan Rakyat). Nama-nama 12 orang anggota perempuan DPRD Provinsi Lampung dan juga sebagai anggota Kaukus Perempuan Perempuan Parlemen adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Daftar Nama Anggota Kaukus Perempuan Perempuan Parlemen dalam DPRD Provinsi Lampung 2015-2019

NO	NAMA	NAMA PARTAI	KOMISI
1	Ririn Kuswantari, S.Sos., M.H	Golkar	I
2	Apriliati, S.H., M.H	PDIP	I
3	Sahanah	NasDem	II
4	Eva Dwiana, S.E., M.Si	PDIP	II
5	Sahyana, S.E	Nasdem	III
6	Martalena	Demokrat	IV
7	Zeldayati	PPP	IV
8	Syafariah Widiati, S.H., M.H	PDIP	V
9	Elly Wahyuni, S.E., M.M	Gerindra	V
10	Asih Fatwanita, M.M	NasDem	V
11	Karlina, S.E., M.M	PKB	V
12	Asmara Dewi, S.H., M.H	PAN	V

Sumber : Diolah oleh Peneliti 18 Januari 2019

B. Visi dan Misi Kaukus Perempuan Parlemen

1. Visi

Terciptanya tatanan, relasi sosial, dan pola perilaku yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, menghargai keberagaman, bebas dari diskriminasi dan terwujudnya kesetaraan dan keadilan dalam seluruh bidang kehidupan.

2. Misi

- 1) Meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik,
- 2) Mengupayakan agar seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki secara seimbang dan adil,
- 3) Meningkatkan akses, kontrol dan partisipasi perempuan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi,
- 4) Mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang berwawasan gender, termasuk kebijakan anggaran yang berwawasan gender,
- 5) Memperkuat jejaring dengan gerakan masyarakat sipil/CSO, media, eksekutif, yudikatif, akademisi, dan memperkuat solidaritas dengan komunitas korban, pejuang atau pelaku perubahan sosial ditingkat lokal, nasional dan internasional.
- 6) Memperkuat kelembagaan Kaukus Perempuan Parlemen sebagai institusi yang memastikan terjadinya pengarusutamaan gender

dalam produk-produk kebijakan dan beranggotakan perempuan parlemen lintas partai politik.

KPP RI yang dimanifestasikan kedalam 10 isu prioritas yaitu :

- a. Perempuan dan kesehatan
- b. Perempuan dan pendidikan
- c. Perempuan dan pekerjaan
- d. Perempuan dan kekerasan
- e. Perempuan dan Sumber Daya Alam
- f. Perempuan dan HAM
- g. Perempuan dan Media
- h. Perempuan dan Legislasi Nasional
- i. Perempuan dan Budaya

(Republica.co.id diakses pada 18 September 2018 pukul 12:13 WIB).

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Republik Indonesia (KPP RI) No. 03 / SK-KPP RI/ X / 2015 pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Lampung di Lantik. Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung di sahkan berdasarkan Keputusan Rapat Perempuan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung pada tanggal 31 juli 2015 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Lampung. Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung diketuai oleh Ririn Kuswantiri.

Menurut Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, KPP Lampung memiliki tugas untuk melakukan pembekalan politik di 15 Kabupaten/Kota se Lampung. Target KPP Lampung yaitu merujuk kepada KPP RI yakni terpenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Untuk legislator perempuan ditargetkan 20 persen, atau meningkat dari jumlah yang ada saat ini yakni 12,5 persen kaum perempuan di legislator DPRD.

C. Tujuan Kaukus Perempuan Parlemen

Tujuan berdirinya kaukus ini adalah untuk mempercepat proses demokratisasi di Indonesia melalui pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Guna mencapai tujuan tersebut, Kaukus Perempuan Parlemen mengupayakan, antara lain :

1. Memberikan penguatan kapasitas parlemen perempuan di bidang anggaran, pengawasan, legislasi, lobby, advokasi dan komunikasi dengan media.
2. Memastikan terlaksananya tindakan khusus sementara (*affirmative action*), pemenuhan kuota minimal 30 persen perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan publik serta lembaga strategis lainnya.
3. Membangun sinergitas yang efektif dengan kelembagaan DPR/MPR/DPD/DPRD, eksekutif, yudikatif, perguruan tinggi, *Civil Society Organization*, media, pengusaha dalam upaya pemajuan, penegakan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan.

4. Menguatkan jejaring dengan parlemen di tingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Membangun jaringan perempuan parlemen di tingkat asia dan dunia dalam upaya memastikan pemenuhan hak-hak perempuan, utamanya hak politik perempuan.

D. Struktur Kepengurusan Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung

Susunan pengurus kaukus perempuan parlemen Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019

Dewan Pertimbangan :

1. Syafariah Widianti
2. Mega Tarmizi
3. Elly Wahyuni
4. Zeldayarie Aristama

Ketua : Ririn Kuswantari

Wakil Ketua I : Eva Dwiana
 Wakil Ketua II : Asmara Dewi
 Wakil Ketua III : Winarti
 Wakil Ketua IV : Anna Morinda

Sekretaris : Apriliati

Wakil Sekretaris I : Karlina
 Wakil Sekretaris II : Sahyana
 Wakil Sekretaris III : Asih Fatwanita
 Wakil Sekretaris IV : Ernawati

Bendahara : Sahanah

Wakil Bendahara : Karyawati
 Wakil Bendahara : Roslina
 Wakil Bendahara : Ernita

Koordinator Wilayah :

1. Wiwik Anggraini (Bandar Lampung)
2. Nuraida (Metro)
3. Sugiharti (Lampung Selatan)

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 4. Erlinda Widiastuti | (Pesawaran) |
| 5. Umi Laila | (Pringsewu) |
| 6. Buti Kuryani | (Tanggamus) |
| 7. Evinitra | (Lampung Tengah) |
| 8. Nanik Hermin Astuti | (Lampung Timur) |
| 9. Sandy Juwita | (Lampung Utara) |
| 10. Tri Budi Wahyuni | (Lampung Barat) |
| 11. Suriah | (Way Kanan) |
| 12. Mursidah | (Tulang Bawang) |
| 13. Yulisa Tri Ganayu
Barat) | (Tulang Bawang
Barat) |
| 14. Tri Isyani | (Mesuji) |
| 15. Winda Yuhanis | (Pesisir Barat) |

1. Divisi Penguatan Kelembagaan

Koordinator	: Nunung Ida Mundarsih
Anggota	: Jamilah Nur Hafifah Ela Siti Nuryamah Masda Yulita Tumilah Tri Wahyuningsih Ismilawati

2. Divisi Pendidikan

Koordinator	: Wiwin Septiani
Anggota	: Yulistina Herianti Nani Mayasari Suparda Lena Mastuah Ruliyannah Hijriah Wulandari Aminatul Zuhro Harwiyana Haryati Chandralela

3. Divisi Hukum dan HAM

Koordinator	: Wiwik Anggraini
Anggota	: Lusi Aryanti Sumiyati Ria Hartini Firdayana Ismawati Sukartini

4. Divisi Advokasi dan Kebijakan Publik

Koordinator	: Tri Friski Merdeka
Anggota	: Elliyana

Sri Nurwijayanti
Nova Novita Sari
Ratni Makarau
Susi Agustina
Eliza Wati

5. Divisi Pendanaan dan Usaha
Koordinator : Tati
Anggota : Sri Suyanti
Asita Nurgaya
Sri Ningsih Jamsari
Haryati
Welly Apriyani

6. Divisi Database dan Informasi
Koordinator : Christina Jhowry
Anggota : Heni Srijayanti
Ririn Puspitasari
Relawati
Helda Maria
Yuliani Rahmi Savitri

7. Divisi Media dan Pengembangan Jaringan
Koordinator : Febriani Fiska
Anggota : Devita Sahara
Retno Palupi
Sri Wulandari
Bunyana
Arifah Trisiyanti
Sri Wage Sundari
Aprinasari K.S
Sudarmi
Larasati
Tutut Handayani

8. Divisi Riset dan Kajian
Koordinator : Asa Attorida Elhakim
Anggota : Rohimah Rahman
Maharatu
Harwiyana
Farida Aryani
Hailina
Suriah
Rosdo Yunilam
Rika Arlini
Mery Hutasoit
Leny

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Kaukus Perempuan Parlemen Lampung berjejaring dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam hal anggaran. Kaukus Perempuan Parlemen Lampung belum mampu mengoptimalkan kebijakan pro gender karena kesempatan berkumpul membicarakan hal-hal tersebut belum banyak dilakukan terkendala dalam mengatur waktu untuk bertemu secara rutin. Namun, dalam menjalankan program Kaukus Perempuan Parlemen telah berjejaring dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Swadaya Masyarakat Damar, Media massa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Kaukus Perempuan Parlemen Lampung baru memfokuskan pada pendidikan politik pada perempuan belum melaksanakan kegiatan yang berfokus pada anak. Kaukus Perempuan Parlemen Lampung merupakan bagian atau turunan dari Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia sehingga belum adanya kesadaran tersendiri dari masing-masing individu.

Teori *networking institutionalism* dalam optimalisasi kebijakan pro gender.

1. Kerjasama Kebijakan dalam Optimalisasi Kebijakan Pro Gender
Kaucus Perempuan Parlemen belum melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mengusulkan suatu kebijakan terkait gender, tetapi dalam melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan KPU, Akademisi, media massa. LSM Damar tidak ikut serta dalam perumusan kebijakan namun hanya sebatas dalam uji publik peraturan daerah saja.
2. Organisasi Kaucus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung memiliki peraturan yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kaucus Perempuan Parlemen. Kaucus Perempuan Parlemen Lampung telah melakukan Sosialisasi kepada calon legislatif se-Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman anggota Kaucus Perempuan Parlemen Lampung.

Anggaran Responsif gender. Kaucus memperjuangkan melalui komisi yang membidangnya. Organisasi Kaucus tidak berbicara mengenai eksternal atau misalnya terdapat organisasi yang dikurangi mandatnya kaucus tidak mempunyai wewenang. Sumber Daya Manusia seperti psikolog dan ahli hukum untuk pendampingan terhadap perempuan belum dilaksanakan baru wacana saja. Kegiatan-kegiatan tentang perempuan. Kaucus

mensosialisasikannya melalui kegiatan atau acara seminar, tidak roadshow langsung ke Organisasi Perangkat Daerah

3. Transaksi Hubungan Sosial Kaukus dengan Lembaga Lain

Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung untuk menjalankan programnya bekerja sama dengan lembaga lain. Lembaga yang melakukan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam hal anggaran.

4. Mobilisasi politik dan gerakan sosial Kaukus Perempuan Parlemen Lampung

Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung untuk menyatukan visi misi dari anggota kaukus yang berasal dari latarbelakang politik yang berbeda adalah dengan mengacu pada AD/ART Kaukus Perempuan Parlemen. Kaukus Perempuan Parlemen Lampung selain mengurus politik kaum perempuan, mereka juga mengadakan kegiatan bakti sosial.

Mobilisasi dalam Kaukus Perempuan Parlemen Lampung yaitu dengan rapat umum, pendidikan politik, sosialisasi Undang-Undang Pemilu dan bimbingan teknis.

5. Pengaruh sosial, psikologi sosial dan budaya politik dalam Kaukus Perempuan Parlemen

Kaucus Perempuan Parlemen belum mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar, tetapi KPP baru menampung aspirasi masyarakat melalui dialog publik.

Hambatan Kaucus Perempuan Parlemen yaitu waktu. Anggota Kaucus sulit untuk bertemu dikarenakan kesibukan masing-masing anggota. Dengan kendala waktu tersebut, anggota kaucus kurang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kaucus Perempuan Parlemen.

Berdasarkan 5 substantif analisis teori *networking institutionalism* (jaringan kelembagaan) dalam penelitian ini aspek yang belum dimaksimalkan oleh Kaucus Perempuan Parlemen Lampung adalah Organisasi. Secara internal, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh anggota Kaucus Perempuan Parlemen Lampung yaitu dalam hal mengatur waktu untuk berkumpul secara rutin. Sehingga, kurangnya waktu untuk berkumpul menyebabkan kurangnya koordinasi dan interaksi antar anggota untuk membahas persoalan gender.

Kaucus Perempuan Parlemen belum memaksimalkan perannya dalam memenuhi kebutuhan perempuan. Kerjasama kebijakan, hubungan transaksi sosial, mobilisasi politik dan gerakan sosial serta pengaruh sosial, psikologi sosial dan budaya politik dalam Kaucus Perempuan Parlemen Lampung sudah mulai dilakukan.

B. Saran

1. Jaringan kelembagaan sebagai sumber informasi dan dapat menjadi sebuah dukungan. Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dapat bermitra dengan Organisasi Perangkat Daerah untuk optimalisasi kebijakan pro gender
2. Anggota Kaukus Perempuan Parlemen seharusnya aktif dalam melakukan kajian-kajian terkait persoalan gender dan memperluas jaringan kelembagaan dengan lembaga lain .
3. Kaukus Perempuan Parlemen seharusnya sebagai organisasi perempuan dapat memberikan masukan untuk peraturan-peraturan daerah dalam perumusan kebijakan diparlemen agar responsif gender .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Firdaus, M. Aziz. 2012. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Penerbit Ombak : Yogyakarta.
- Ihromi, Tapi Omas. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Alumni : Bandung
- Kandung dkk. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UIP : Jakarta.
- Moleong dan Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Norman, K. Denzim dan Yvonna S. Linclon. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods 4th Edition. Library of Congress Catalogue-in Publication Data* : United Stated of America .
- Rhodes dkk, 2016. *The Oxford Handbook of Political Institutions*.Oxford University Press : New York.
- Ridjal dkk. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. PT Tiara Wacana Yogya :Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES : Jakarta.
- Soetjipto, Budi W. 2010. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia* . Penerbit Amara Books : Yoogyakarta.

Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Aneka Cipta : Jakarta.

Sudaryono. 2017. *Metode Penelitian*. Rajawali Pers : Jakarta.

Stoker & Marsh. 2011. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Penerbit Nusa Media : Bandung.

JURNAL

Sigiro. 2017. Kebijakan Publik Berperspektif Perempuan Mengakui Keberadaan Sekaligus Kesetaraan Perempuan dalam *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan*. Vol 22. No. 1

Ardi, Anis Maryuni. 2014. Perempuan di Legislatif : Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dalam *Jurnal Politik Muda* Vol 3, No. 3.

Budiatri, Aisah Putri. 2011. Bayang-Bayang Afiriasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Di Indonesia dalam *Jurnal Studi Politik*, Vol 1, No.2.

Darmastuti, Ari dkk. 2011. Studi Kebijakan Pembangunan Daerah Berperspektif Gender di Kabupaten Lampung Tengah dalam *Jurnal Sosiologi*, Vol 14 No 1.

Editorial. 2011. Perempuan dan Politik dalam *jurnal studi politik*, Vol. 1 No. 2.

Hardjaloka, Loura. 2012. Potret Keterwakilan Perempuan dalam wajah politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol 9 No 2 .

Inwantoro, Totok. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014.

Muslimat, Ade. 2016. Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol 3 No 2.

Purwanti, Ani. 2017. Jurnal Kendala Peningkatan Kuota Perempuan dalam Membuat Kebijakan, dalam *Jurnal Seminar Nasional*

PRODUK HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Surat Keputusan Gubernur Lampung No : G/315/V.08/HK/2017

Surat Keputusan Gubernur Lampung No : G/224/V.08/HK/2018

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Republik Indonesia (KPP RI) No. 03/SK-KPP RI/X/2015 Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kaukus Perempuan Parlemen

ARTIKEL-ARTIKEL

Abs. 2017. *Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung Sosialisasikan UU Pemilu nomor 7 Tahun 2017* dalam Lampung7news.com edisi 12 Desember 2017.

Agung, Subhan. 2010. *Partai Politik, Sistem Pemerintahan dan Oposisi Politik* dalam subhanagung.blogspot.com edisi 7 Maret 2011.

DPD RI, 2015. *KPP RI Meneguhkan Komitmen Politik Perempuan Parlemen Bagi Keterwakilan Isu Perempuan dan Anak* dalam www.dpd.go.id edisi 04 September 2015.

Kppri. 2018. *Siapa Anggota KPP RI?* dalam kppri.wordpress.com edisi 18 Februari 2018.

Supriyanto, Agung. 2017. *Keterwakilan Perempuan di Parlemen Disebut Alami Penurunan* dalam Republica.co.id edisi 15 November 2017.

Murdaningsih, Dwi. 2015. *Kaukus Perempuan Parlemen Miliki 10 Isu Prioritas* dalam Republica.co.id edisi 04 September 2015.

Tashandra, Nabilla. 2016. *Diskriminasi Gender, Tujuh UU Terkait Perempuan ini Perlu Diubah* dalam Kompas.com edisi 6 Maret 2016.

Zulkarnain, Endra. 2017. *Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung Dorong Keterwakilan Perempuan di Parlemen* dalam Tribunlampung.co.id edisi 8 Desember 2017.